

## **Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur**

Hari Setiono

**Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit**

[setionohari171167@gmail.com](mailto:setionohari171167@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah jenis deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk memaparkan data penelitian yang berupa angka dengan cara mendiskripsikannya untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang tertuang pada PERDA APBD Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Penelitian didiskripsikan dalam bentuk tabel untuk mengetahui berapa besar prosentase kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap PAD. Hasil penelitian dari tahun 2013-2016 rata-rata pajak daerah berkontribusi sebesar 83,49% dan retribusi daerah berkontribusi sebesar 0,98%. Kontribusi pajak tertinggi adalah tahun 2015 sebesar 85,24% dan Kontribusi retribusi tertinggi adalah tahun 2013 sebesar 1,33%.

**Kata Kunci :** Pajak daerah, Retribusi Daerah, Kontribusi

### **ABSTRACT**

Local tax is a compulsory contribution owed by an individual or an entity to finance local government administration and development. Local Levy is one of the Original Revenue as a source of financing the implementation of government and regional development, to improve and state the welfare of the community. The original revenues of the regions are all receipts obtained by the region from sources within its own territory which are levied according to the local regulations in accordance with the prevailing laws and regulations. This research is a quantitative descriptive type that aims to describe the data of research in the form of numbers by way of describing it to know the contribution of local taxes and levies to local revenue originated in PERDA APBD East Java Province from 2013 until 2016. Research is described in the form table to find out how much the percentage of local tax contribution and levy to PAD. The results of the year 2013-2016 average local taxes contribute 83.49% and local levies contribute 0.98%. The highest tax contribution is 2015 of 85.24% and the highest levy contribution is in 2013 at 1.33%.

**Keywords:** Local Taxes, Regional Retributions, Contributions

### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang-undang. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Dalam mengimplementasikan rencana kerja pembangunan daerah pengelolaan keuangan daerah mempunyai peran vital dan juga secara tak langsung mendukung rencana pembangunan nasional.

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dalam APBD semua

Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola. APBD ialah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya disebut pembiayaan.

Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen penerimaan pada PAD yang tertuang pada laporan PERDA APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yaitu selama empat tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertuang pada PERDA APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2016 dan mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertuang pada PERDA APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2016. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan penulis mengenai sumbangan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah provinsi Jawa Timur. Bagi pihak lain, merupakan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2016 dan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan pengembangan sektor-sektor yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah. Sedangkan fungsi APBD adalah Sebagaimana fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka APBD berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD bersumber dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain – lain PAD yang sah.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat digolongkan menjadi beberapa jenis pajak berdasarkan sifat (pajak langsung dan pajak tidak langsung), instansi pemungut (pajak daerah dan pajak negara) dan juga berdasarkan obyek dan subyek pajak (pajak objektif dan pajak subjektif).

pengertian pajak daerah Pengertian Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), di mana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

di daerah. jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Yang termasuk dalam pajak daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri retribusi daerah adalah Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah, Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis, Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara. Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Obyek yang diteliti oleh penulis termasuk jenis obyek sekunder karena obyek yang diamati didapat dari sumber kedua. Obyek penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah secara umum sesuai PERDA APBD pemerintah propinsi Jawa Timur. Ruang lingkup penulisan penelitian ini adalah PERDA APBD Provinsi Jawa Timur dengan data tahun yang digunakan antara tahun 2013-2016 yang merupakan data periodik yang dapat direkap dan dianggap sebagai data yang akurat dan representatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan terapan dibidang sosial khususnya ekonomi. Tempat penelitian yang penulis pilih adalah Library Research (Penelitian Kepustakaan) Ekonomi makro dan pembangunan merupakan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan penelitian secara deskriptif. Secara umum penulis melakukan penelitian dengan analisis data sekunder. Data yang digunakan adalah data eksternal. Data eksternal adalah data yang dicari secara manual dengan cara mendapatkannya dari luar perusahaan. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu studi pustaka yaitu dengan cara mencari jurnal dan buku - buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan studi lapangan yaitu pengumpulan data dari basis data yang diperoleh dari media internet dengan cara mendownload melalui situs untuk memperoleh data mengenai PERDA APBD keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah dipublikasikan.

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, maka untuk menganalisis data yaitu dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan data kuantitatif yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang diteliti adalah laporan PERDA APBD Provinsi Jawa Timur selama 4 tahun yaitu dari tahun 2013-2016. PERDA APBD berisikan laporan rancangan anggaran pendapatan dan belanja yang tersaji dalam bentuk nominal atau kuantitatif. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variable atau lebih tapi bersifat mandiri, oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan. Statistik deskriptif merupakan bagian dari statistik yang mempelajari metode pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena.

Dari data yang diperoleh maka penulis akan melakukan perhitungan prosentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan prosentase kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. dari perhitungan prosentasi maka dapat dilihat dan penulis dapat memakarkan serta mendiskripsikan berapa prosentase besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara periodik dari tahun 2013-2016 serta mengetahui tahun tertinggi kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menghitung prosentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Pajak daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Menghitung prosentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Retribusi daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Menghitung rata-rata prosentase kontribusi pajak daerah selama empat tahun dari 2013-2016 menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Prosentase Kontribusi}}{\text{Jumlah Tahun}}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara 111<sup>0</sup> Bujur Timur – 114<sup>04</sup> Bujur Timur dan 7<sup>0</sup> 12' Lintang Selatan – 8<sup>048</sup> Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km<sup>2</sup>. Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur memiliki berbagai macam tempat pariwisata, pariwisata merupakan lokomotif pembangunan ekonomi. Selain berpotensi dibidang pariwisata, Jawa Timur juga memiliki potensi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan juga transportasi. Salah satu contoh potensi Jawa Timur dibidang perkebunan adalah Produksi tembakau Nasional sebesar 100.162 ton berasal dari Provinsi Jawa Timur. Prosentase kontribusi produksi tembakau Jawa Timur adalah 52,41% skala Nasional. Dengan potensi Jawa Timur yang dimiliki maka akan meningkatkan pendapatan daerah di bidang pajak dan retribusi maupun sumber pendapatan daerah lainnya. Berikut daftar penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan total PAD Provinsi Jawa Timur berdasarkan PERDA APBD 2013-2016.

**Tabel 1 Pajak Daerah, Retribusi daerah dan PAD Tahun 2013 - 2016**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi daerah	Total PAD
2013	Rp. 7.863.719.633.500	Rp. 126.405.755.500	Rp. 9.523.901.967.476
2014	Rp. 9.285.000.000.000	Rp. 104.887.319.435	Rp. 11.103.564.801.835
2015	Rp. 12.591.000.000.000	Rp. 136.337.487.000	Rp. 14.771.139.275.000
2016	Rp. 12.579.000.000.000	Rp. 111.423.347.740	Rp. 15.245.241.800.213

Total dari pendapatan pajak daerah adalah Rp. 7.863.719.633.500,-. Pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.421.280.366.500,- menjadi Rp. 9.285.000.000.000,-. Pada tahun 2015 pendapatan pajak Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp.12.591.000.000.000,-. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibanding dengan pendapatan pajak daerah dari tahun sebelumnya dengan selisih kenaikan sebesar Rp. 3.306.000.000.000,-. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur turun sebesar Rp. 12.000.000.000,- menjadi Rp.12.579.000.000.000,-

Pada tahun 2013 total dari pendapatan retribusi daerah adalah Rp.126.405.755.500,- Pada tahun 2014 penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp.21.518.436.065,- menjadi Rp. 104.887.319.435,-. Pada tahun 2015 pendapatan retribusi Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp. 136.337.487.000,- Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibanding dengan pendapatan retribusi daerah dari tahun sebelumnya dengan selisih kenaikan sebesar Rp.31.450.167.565,-. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 penerimaan retribusi daerah Provinsi Jawa Timur turun sebesar Rp.24.914.139.260,- menjadi Rp. 111.423.347.740,-.

Pada tahun 2013 total dari PAD adalah Rp. 9.523.901.967.476,-. Pada tahun 2014 total PAD mengalami kenaikan sebesar Rp1.579.662.834.359,- menjadi Rp11.103.564.801.835,-. Pada tahun 2015 PAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp. 14.771.139.275.000,-. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibanding dengan PAD dari tahun sebelumnya dengan selisih kenaikan sebesar Rp. 3.667.574.473.165,-. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 total PAD Provinsi Jawa Timur juga tetap mengalami kenaikan sebesar Rp. 474.102.525.213,- menjadi Rp.15.245.241.800.213,-.

**Tabel 2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Provinsi Jawa Timur**

Tahun	Pajak Daerah	Total PAD	%
2013	Rp. 7.863.719.633.500	Rp. 9.523.901.967.476	82,57
2014	Rp. 9.285.000.000.000	Rp. 11.103.564.801.835	83,62
2015	Rp. 12.591.000.000.000	Rp. 14.771.139.275.000	85,24
2016	Rp. 12.579.000.000.000	Rp. 15.245.241.800.213	82,51

Tabel diatas menunjukkan prosentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 82,57% di tahun 2013. Pada tahun berikutnya prosentase kontribusi pajak daerah naik sebesar 1,05 menjadi 83,62%. Tahun 2015 pendapatan pajak daerah memberikan kontribusi kepada PAD sebesar 85,24%, nilai tersebut lebih tinggi dari dua tahun terakhir. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 pendapatan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 2,73% menjadi 82,51%. Pada tahun terakhir merupakan kontribusi pajak yang paling rendah dibanding tiga tahun sebelumnya. Rata-rata pajak daerah berkontribusi sebesar 83,49%.

**Tabel 3 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Provinsi Jawa Timur**

Tahun	Retribusi	Total PAD	%
2013	Rp. 126.405.755.500	Rp. 9.523.901.967.476	1,33
2014	Rp. 104.887.319.435	Rp. 11.103.564.801.835	0,94
2015	Rp. 136.337.487.000	Rp. 14.771.139.275.000	0,92
2016	Rp. 111.423.347.740	Rp. 15.245.241.800.213	0,73

Tabel diatas menunjukkan prosentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 1,33% di tahun 2013. Pada tahun berikutnya prosentase kontribusi retribusi daerah turun sebesar 0,38% menjadi 0,94%. Tahun 2015 pendapatan retribusi daerah memberikan kontribusi kepada PAD sebesar 0,92%, nilai tersebut lebih rendah dari dua tahun terakhir. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 0,19% menjadi 0,73%. Pada tahun terakhir merupakan kontribusi retribusi yang paling rendah dibanding tiga tahun sebelumnya. Rata-rata retribusi daerah berkontribusi sebesar 0,98%.

## KESIMPULAN

Pajak daerah rata-rata memberikan kontribusi selama empat tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 83,49%. Kontribusi tertinggi pajak daerah di Provinsi Jawa Timur sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2015 sebesar 85,24%. Kontribusi terendah pajak daerah di Provinsi Jawa Timur sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2016 sebesar 82,51%. Dari tahun 2013 sampai dengan 2015 Kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan

dengan tingkat kenaikan rata-rata 1,34% dan pada tahun 2016 Kontribusi pajak daerah turun sebesar 2,73% dari tahun sebelumnya.

Retribusi daerah rata-rata memberikan kontribusi selama empat tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 0,98%. Kontribusi tertinggi retribusi daerah di Provinsi Jawa Timur sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,33%. Kontribusi terendah retribusi daerah di Provinsi Jawa Timur sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,73%. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Kontribusi retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD terus mengalami penurunan dengan rata-rata tingkat sebesar 0,20%.

## REFERENSI

- Ahmad, Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- D.N., Arief Himmawan (2014). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol : 21 No : 2 hal : 189-205.
- Diza, Mohd. Rangga. (2009). Kontribusi Pajak daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Jenis dan sumber data adalah Data sekunder dengan mengunduh laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2004-2007, *Skripsi Program Sarjana Ekonomi Akuntansi*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Hasan, Iqbal. (2004). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- Husein Umar, (2003). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka.
- Ilyas, Waluyo., dan Wirawan. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Isfatul Fauziah, (2014). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang). *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3 No : 1 hal : 1-7.
- Jatimprov. (2015). Profil tentang Jawa Timur. 23 September 2015. <http://jatimprov.go.id/read/sekilas-jawa-timur/profil>. Visitasi : 02 Agustus 2017.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mustika, Winda Ayu (2014). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol : 3 No : 6 hal : 1-24.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : Penerbit UII Pres.
- Rahardjo, Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot, P. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Ketujuh*, Bandung : Penerbit CV. Alfabeta.



Prive;Volume 1, Nomor 1, Maret 2018  
ISSN Online : 2615-7306 ISSN Cetak : 2615-7314  
<http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.